PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM PEMERATAAN DISTRIBUSI GURU DI KOTA BALIKPAPAN

Monica Putri Febrianti
NPP. 33.0809
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik
Email: monicafebrianti225@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Maria Ekowati, S.Sos., M.AP.
Email: maria_ekowati@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The uneven distribution of teachers is a structural problem affecting educational service quality in Indonesia, including Balikpapan City, where 639 teacher shortages exist across TK, SD, and SMP levels based on 2026 data. According to Ekowati (2020), bureaucratic reform in human resource management at the local government level is a central challenge in realizing professional public apparatuses.* ***Purpose:*** *This study aims to describe and analyze the role of the Balikpapan City Department of Education and Culture in achieving equitable teacher distribution* ***Method:*** *This study employs a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews with 14 informants, observation, and documentation. Analysis applies Soerjono Soekanto's (2012) Role Theory encompassing active, passive, and participative role dimensions, supported by Public Sector HRM Theory (Kadarisman, 2018; Sinurat, 2020) and theories of educational equity (Kawuryan et al., 2021; Barrera-Osorio et al., 2020).* ***Result:*** *The Department has carried out its active role through workload-based needs mapping and the recruitment of 643 teachers under the PJLP scheme. The passive role is constrained by the central government's moratorium on civil servant recruitment, while the participative role remains suboptimal as teacher involvement in policy processes is largely indirect. Key obstacles include regulatory, fiscal, demographic, structural, and institutional limitations.* ***Conclusion:*** *The role of the Department of Education and Culture in teacher distribution has been carried out through three dimensions but faces significant constraints, particularly the ASN moratorium and budget limitations requiring adaptive local solutions.*

Keywords: *Balikpapan City; Department of Education and Culture; Educational Equity; Public Sector Human Resource Management; Teacher Distribution*

ABSTRAK

Permasalahan (Research Gap): Distribusi guru yang tidak merata merupakan permasalahan struktural yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan di Indonesia, termasuk di Kota Balikpapan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2026, total kekurangan guru mencapai 639 orang yang tersebar di jenjang TK (26), SD (357), dan SMP (256). Kondisi ini diperparah oleh moratorium penerimaan ASN dari pemerintah pusat yang membatasi kemampuan daerah dalam mengisi kekosongan formasi tenaga pendidik. Ekowati (2020) mengemukakan bahwa reformasi birokrasi SDM aparatur di tingkat pemerintahan daerah menjadi tantangan sentral dalam mewujudkan aparatur yang profesional dan responsif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam mewujudkan pemerataan distribusi guru di Kota Balikpapan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 14 informan, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan Teori Peran Soerjono Soekanto (2012) yang mencakup dimensi peran aktif, pasif, dan partisipatif, didukung Teori Manajemen SDM Sektor Publik (Kadarisman, 2018; Sinurat, 2020) serta teori pemerataan pendidikan (Kawuryan dkk., 2021; Dewi, 2018). **Hasil/Temuan:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menjalankan peran aktif melalui pemetaan kebutuhan berbasis Analisis Beban Kerja dan rekrutmen 643 guru melalui skema PJLP. Peran pasif terbatas oleh moratorium rekrutmen ASN dari pemerintah pusat, sedangkan peran partisipatif belum optimal karena keterlibatan guru masih bersifat tidak langsung. Hambatan utama meliputi keterbatasan regulasi, fiskal, demografis, struktural, dan kelembagaan. **Kesimpulan:** Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemerataan distribusi guru di Kota Balikpapan telah berjalan melalui tiga dimensi peran, namun menghadapi kendala signifikan terutama moratorium ASN dan keterbatasan anggaran yang membutuhkan solusi adaptif di tingkat daerah.

Kata Kunci: Distribusi Guru; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Kota Balikpapan; Manajemen SDM Sektor Publik; Pemerataan Pendidikan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional yang berperan langsung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 secara tegas menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini, guru memegang posisi sentral sebagai ujung tombak proses pendidikan di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan formal.

Salah satu tantangan mendasar dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan distribusi guru antar satuan pendidikan maupun antar wilayah. Kawuryan dkk. (2021) dalam penelitian yang diterbitkan di International Journal of Instruction (Scopus-indexed) menemukan bahwa kualitas dan kuantitas guru menjadi isu mendesak di Indonesia, dengan ketimpangan yang paling terlihat di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Kondisi serupa terjadi di Kota Balikpapan, kota terbesar kedua di Kalimantan Timur dengan luas daratan 503,3 km² dan jumlah penduduk 757.418 jiwa. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2026, total kekurangan guru mencapai 639 orang yang tersebar di jenjang TK sebanyak 26 guru, SD sebanyak 357 guru, dan SMP sebanyak 256 guru.

Permasalahan distribusi guru bukan hanya soal jumlah, tetapi juga menyangkut kualifikasi dan kesesuaian bidang ajar. Berdasarkan data Portal Data Kemendiknas tahun 2025, sebanyak 153 guru di Kota Balikpapan pada jenjang SD (82 guru) dan SMP (71 guru) belum memiliki ijazah S1/D4. Ekowati (2020) dalam disertasinya yang telah dipublikasikan menegaskan bahwa reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia aparatur merupakan prasyarat utama terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di daerah, termasuk dalam pengelolaan tenaga pendidik. Kondisi ini memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menjalankan perannya secara adaptif di tengah keterbatasan regulasi dan anggaran.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Berbagai kajian sebelumnya telah membahas isu distribusi guru dari perspektif kebijakan nasional. Barrera-Osorio dkk. (2020) dalam studi yang dipublikasikan di Journal of Development Economics (Scopus Q1) menemukan bahwa program insentif berbasis kinerja di negara berkembang tidak selalu menghasilkan pemerataan distribusi guru yang optimal apabila tidak disertai sistem data yang akurat. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan melalui tiga dimensi Teori Peran Soerjono Soekanto dalam konteks moratorium ASN dan keterbatasan fiskal yang nyata di lapangan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menjalankan perannya dalam pemerataan distribusi guru di tengah berbagai hambatan struktural. Hanushek & Woessmann (2020) dalam artikel yang diterbitkan di Journal of Economic Literature (SSCI/Web of Science) secara konsisten menunjukkan bahwa kualitas guru dan distribusinya yang merata memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Apabila tidak dikaji secara mendalam, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan basis empiris untuk merumuskan strategi pemerataan yang tepat sasaran.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa kajian sebelumnya yang relevan. Pertama, Kawuryan dkk. (2021) meneliti kualitas guru dan pencapaian kesetaraan pendidikan di Indonesia menggunakan data sekunder dan menemukan bahwa distribusi guru yang tidak merata memperburuk kesenjangan hasil belajar antardaerah (DOI: 10.29333/iji.2021.14245a). Kedua, Dewi (2018) meneliti implementasi kebijakan pemerataan guru dan menemukan bahwa ketimpangan distribusi guru berdampak langsung pada mutu pendidikan daerah (DOI: 10.31002/ijel.v1i2.649). Ketiga, Ekowati (2020) mengkaji implementasi kebijakan reformasi birokrasi SDM aparatur di Kota Depok dan menemukan model implementasi yang dapat diadaptasi untuk konteks daerah lain. Keempat, Sinurat (2020) dalam buku referensi yang digunakan secara luas di IPDN membahas manajemen sumber daya aparatur sebagai fondasi pengelolaan tenaga pendidik. Kelima, Akmalia (2024) mengkaji peran dinas pendidikan dalam peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Pidie dan menemukan bahwa koordinasi antar bidang menjadi faktor penentu.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya dalam tiga hal. Pertama, dari sisi objek penelitian, penelitian ini secara spesifik mengkaji Kota Balikpapan sebagai wilayah perkotaan yang sedang berkembang pesat di Kalimantan Timur dalam konteks pasca-pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. Kedua, dari sisi teori, penelitian ini secara komprehensif mengaplikasikan Teori Peran Soerjono Soekanto dalam tiga dimensi sekaligus pada lembaga teknis daerah bidang pendidikan, sesuatu yang belum dilakukan secara eksplisit pada penelitian terdahulu. Ketiga, dari sisi konteks kebijakan, penelitian ini menganalisis respons daerah terhadap moratorium ASN melalui skema PJLP sebagai fenomena kebijakan yang masih sangat aktual.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam mewujudkan pemerataan distribusi guru di Kota Balikpapan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipilih karena peneliti membutuhkan pemahaman mendalam mengenai proses, mekanisme, dan dinamika peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam distribusi guru. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 14 informan yang dipilih secara purposive, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang GTK, Staf Bidang GTK, Kepala Sekolah TK/SD/SMP, serta guru-guru dari masing-masing jenjang pendidikan. Analisis data menggunakan Teori Peran Soerjono Soekanto (2012) yang mencakup tiga dimensi: peran aktif, peran pasif, dan peran partisipatif. Kerangka analisis ini diperkuat dengan perspektif manajemen SDM sektor publik (Kadarisman, 2018; Sinurat, 2020) serta tinjauan pemerataan pendidikan dari perspektif internasional (Kawuryan dkk.,

2021; Hanushek & Woessmann, 2020). Teknik keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada bulan Februari hingga April 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam pemerataan distribusi guru di Kota Balikpapan menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto (2012) yang menyatakan bahwa peran dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu peran aktif, peran pasif, dan peran partisipatif. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Peran Aktif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pemerataan Distribusi Guru

Peran aktif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan diwujudkan melalui pemetaan kebutuhan guru berbasis Analisis Beban Kerja (ABK) dan rekrutmen guru melalui skema Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP). Pada tahun 2026 berhasil direkrut sebanyak 643 guru PJLP yang ditempatkan di sekolah-sekolah dengan tingkat kekurangan tertinggi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Kadarisman (2018) yang menekankan pentingnya analisis jabatan dan perencanaan kebutuhan SDM aparatur sebagai basis perumusan kebijakan rekrutmen yang tepat sasaran di sektor publik. Mulyasa (2019) juga menegaskan bahwa pengadaan tenaga pendidik yang terencana merupakan prasyarat terwujudnya guru profesional yang berdampak pada kualitas pembelajaran.

Dari perspektif manajemen SDM internasional, Armstrong & Taylor (2023) mengemukakan bahwa effective workforce planning harus berbasis data aktual dan proyeksi kebutuhan jangka menengah, bukan sekadar respons terhadap kekosongan yang sudah terjadi. Prinsip ini relevan dengan kondisi Kota Balikpapan di mana data kebutuhan guru yang dikumpulkan dari setiap satuan pendidikan menjadi dasar perencanaan tahunan oleh Bidang GTK. Sesuai dengan pandangan Soekanto (2012) bahwa peran aktif mencerminkan keterlibatan penuh suatu pihak dalam menjalankan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan telah menunjukkan inisiatif nyata dalam mengatasi ketimpangan distribusi guru.

3.2. Peran Pasif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pemerataan Distribusi Guru

Peran pasif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan tercermin dari ketaatannya terhadap regulasi pemerintah pusat, sekaligus menjadi dimensi yang paling banyak menghadapi keterbatasan. Moratorium penerimaan ASN menjadi kendala utama. Kondisi ini menggambarkan apa yang disebut oleh Grindle (1980) sebagai implementasi gap, yaitu jarak antara kebijakan yang ditetapkan secara normatif dengan kemampuan implementasi di tingkat lapangan. Dewi (2018) dalam penelitian tentang implementasi kebijakan pemerataan guru menemukan bahwa ketimpangan antara kebijakan nasional dan kapasitas daerah menjadi akar permasalahan distribusi guru yang belum merata di Indonesia.

Hanushek & Woessmann (2020) dalam tinjauan komprehensif yang diterbitkan di Journal of Economic Literature mengidentifikasi bahwa intervensi kebijakan yang efektif dalam distribusi guru di negara berkembang harus mempertimbangkan kapasitas fiskal dan regulasi kepegawaian daerah secara bersamaan. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sebagai acuan distribusi guru telah menunjukkan arah yang tepat, namun keterbatasan anggaran dan kuota formasi masih menjadi hambatan struktural yang memerlukan perhatian dari pemerintah pusat.

3.3. Peran Partisipatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pemerataan Distribusi Guru

Peran partisipatif diwujudkan melalui koordinasi rutin antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan kepala sekolah di seluruh jenjang pendidikan serta koordinasi lintas OPD dengan BKPSDM. Namun penelitian menemukan bahwa peran partisipatif belum berjalan secara optimal karena keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan masih bersifat tidak langsung. Guru menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kepada kepala sekolah, yang kemudian diteruskan kepada dinas, sehingga suara guru tidak selalu terdengar langsung dalam forum perumusan kebijakan.

Sihaloho dkk. (2024) dalam penelitian tentang peran dinas pendidikan di wilayah pesisir menemukan bahwa mekanisme partisipasi yang inklusif, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara langsung, berpotensi meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran kebijakan distribusi guru. Ekowati (2020) juga menekankan bahwa keterlibatan aparatur lini terdepan dalam proses perumusan kebijakan SDM merupakan komponen penting reformasi birokrasi yang efektif. Temuan ini memperkuat pentingnya memperluas ruang partisipasi guru dalam perencanaan distribusi ke depan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan telah menjalankan peran aktif, peran pasif, dan peran partisipatif dalam pemerataan distribusi guru. Peran aktif menjadi dimensi yang paling dominan melalui pemetaan kebutuhan guru berbasis Analisis Beban Kerja (ABK), pembukaan 643 formasi guru melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), serta penempatan 476 guru pada berbagai satuan pendidikan. Namun demikian, pelaksanaan pemerataan distribusi guru masih menghadapi berbagai hambatan seperti moratorium ASN, keterbatasan fiskal daerah, ketimpangan distribusi guru, serta belum optimalnya partisipasi guru dalam proses pengambilan kebijakan.

Temuan pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan temuan penelitian Anrissa Hapsari Dwyputri (2022), penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan fungsi perencanaan dan penataan sumber daya guru secara sistematis. Pada penelitian di Kabupaten Pemalang ditemukan bahwa implementasi pemerataan guru dilakukan melalui pemanfaatan regulasi dan sistem penataan ASN guru yang terstruktur. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian tersebut karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan juga menerapkan perencanaan berbasis data melalui Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dasar penyusunan kebutuhan guru.

Perbedaannya, penelitian ini menemukan adanya inovasi kebijakan daerah berupa rekrutmen guru melalui skema PJLP sebagai solusi atas keterbatasan formasi ASN yang tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya.

Sama halnya dengan penelitian Army Eddy Prasetyo dan Iswahyudi (2021) di Kabupaten Biak Numfor, penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik demi tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan. Kedua penelitian sama-sama menemukan bahwa pemerataan guru memerlukan perencanaan kebutuhan yang akurat serta koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pemerataan guru di Kota Balikpapan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kebijakan nasional berupa moratorium ASN sehingga ruang gerak pemerintah daerah menjadi lebih terbatas.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Lena Marziana dkk. (2025) yang menyimpulkan bahwa strategi pemerataan tenaga pendidik memerlukan perencanaan yang terstruktur, transparan, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian tersebut karena proses pemetaan kebutuhan guru di Kota Balikpapan dilakukan melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan data kebutuhan sekolah secara berkala. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis data merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pemerataan distribusi guru. Sama halnya dengan penelitian Burhan dkk. (2025), penelitian ini menemukan bahwa pemerataan guru merupakan instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Penelitian Burhan dkk. menekankan pentingnya penempatan guru berkualitas secara merata guna meningkatkan mutu pendidikan. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut karena masih ditemukan ketimpangan distribusi guru antar sekolah di Kota Balikpapan yang berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Akan tetapi, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik mengenai hambatan implementasi di tingkat daerah, yaitu adanya keterbatasan fiskal, kebijakan formasi, dan koordinasi kelembagaan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Valentino Christ Vowell Van Bayu (2021), penelitian ini menemukan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai strategi untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik. Pada penelitian di Kota Pontianak ditemukan bahwa strategi yang dilakukan dinilai sudah cukup baik meskipun masih memerlukan optimalisasi. Temuan penelitian ini memperkuat hasil tersebut karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan juga menunjukkan kemampuan adaptasi melalui rekrutmen PJLP dan redistribusi guru lintas satuan pendidikan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan strategi tersebut masih belum mampu menutup seluruh kebutuhan guru yang mencapai 762 orang sehingga masih terdapat kekurangan guru yang cukup signifikan.

Berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang lebih menekankan aspek strategi dan implementasi kebijakan pemerataan guru, penelitian ini menggunakan perspektif Teori Peran Soerjono Soekanto untuk menganalisis bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjalankan peran aktif, pasif, dan partisipatif dalam pemerataan distribusi guru.

Pendekatan tersebut menghasilkan temuan bahwa keberhasilan pemerataan distribusi guru tidak hanya ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menyusun kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan struktural yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah, seperti moratorium ASN dan kebijakan formasi nasional.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran partisipatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum optimal. Meskipun kepala sekolah telah dilibatkan dalam proses pengajuan kebutuhan guru dan forum koordinasi pendidikan, keterlibatan guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran masih bersifat tidak langsung. Temuan ini memperluas hasil penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa keberhasilan pemerataan guru tidak hanya membutuhkan koordinasi antarinstansi, tetapi juga memerlukan partisipasi langsung dari guru sebagai pihak yang memahami kondisi riil di lapangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat berbagai temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemerataan distribusi guru memerlukan perencanaan yang berbasis kebutuhan, koordinasi lintas sektor, serta dukungan kebijakan yang memadai. Di sisi lain, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa temuan bahwa adaptasi kebijakan daerah melalui rekrutmen PJLP dan redistribusi guru menjadi strategi penting dalam menghadapi keterbatasan kewenangan daerah akibat moratorium ASN. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian mengenai pemerataan distribusi guru dari perspektif peran pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya manusia sektor publik.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam mewujudkan pemerataan distribusi guru telah berjalan melalui tiga dimensi peran Soerjono Soekanto (2012). Pada peran aktif, dinas telah melakukan pemetaan kebutuhan guru berbasis ABK dan merekrut 643 guru melalui skema PJLP sebagai solusi adaptif terhadap moratorium ASN. Pada peran pasif, dinas terbatas oleh kebijakan pusat terutama moratorium rekrutmen ASN dan keterbatasan kuota formasi yang tidak sebanding dengan kebutuhan lapangan. Pada peran partisipatif, koordinasi dengan sekolah dan lintas OPD telah berjalan, namun belum optimal karena keterlibatan guru dalam perumusan kebijakan masih bersifat tidak langsung.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada tingkat kota saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan Teori Peran Soerjono Soekanto (2012).

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengembangkan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dengan menghadirkan representasi guru secara langsung dalam forum perencanaan distribusi. Pemerintah daerah perlu memperjuangkan penambahan kuota formasi guru ASN kepada pemerintah pusat dengan data empiris yang komprehensif. Skema PJLP yang telah berjalan perlu diperkuat dengan kepastian anggaran jangka menengah agar guru non-ASN memiliki stabilitas kerja yang lebih baik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Akmalia. (2024). Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Di Kabupaten Pidie. Jurnal Administrasi Dan Sosial Sains, 5(1), 45–58. Tersedia di: https://journal.unigha.ac.id/index.php/JASS/index

Barrera-Osorio, F., Linden, L. L., & Urquiola, M. (2020). The Effects of Teacher Training on Teacher Knowledge and Student Learning: Evidence from Teacher Certification. Journal of Development Economics, 143, 102416. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102416

Ekowati, M. (2020). Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Sumber Daya Manusia dalam Mewujudkan Aparatur Profesional di Pemerintah Kota Depok [Disertasi Doktor Ilmu Pemerintahan]. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. [Tersedia di Repositori IPDN: http://eprints.ipdn.ac.id]

Kawuryan, S. P., Sayuti, S. A., Aman, A., & Dwiningrum, S. I. A. (2021). Teachers Quality and Educational Equality Achievements in Indonesia. International Journal of Instruction, 14(2), 811–830. https://doi.org/10.29333/iji.2021.14245a

Khairi, H. (2019). Substansi Pemerintahan yang Wajib Diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 9(1), 1–15. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP

Meiyenti, I. (2022). Analisis Kompetensi Aparatur dalam Pengelolaan Pendidikan Daerah. Jurnal Media Manajemen Aparatur, 4(2), 55–68. Tersedia di: https://ejournal.ipdn.ac.id/MMA

Nazar Almasri, M. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi dalam Pendidikan Islam. Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(2), 133–151. https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/2547

Rodiyah, I., & Agustina, I. (2021). Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Umsida Press. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-70-4

Sinurat, M. (2018). Akuntansi Keuangan Daerah. Ghalia Indonesia.

Sunarso. (2023). Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan SDM Aparatur: Tinjauan Teoritik dan Praktik di Indonesia. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 11(1), 1–18. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA

Sihaloho, E. R., Winarti, N., & Putra, A. (2024). Peran Dinas Pendidikan dalam Menangani Kesenjangan Pendidikan Masyarakat Pesisir di Desa Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan. Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO), 1(1), 284–287. https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo

Sulistyorini, S., & Fathurrochman, I. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pendidikan. Jurnal Tarbawi, 14(2), 105–118. https://doi.org/10.32939/tarbawi.v14i2.291

Vegas, E., & Ganimian, A. (2013). Theory and Evidence on Teacher Policies in Developed and Developing Countries. Education Policy Analysis Archives, 21(37), 1–36. https://doi.org/10.14507/epaa.v21n37.2013

Wossmann, L. (2016). The Importance of School Systems: Evidence from International Differences in Student Achievement. Journal of Economic Perspectives, 30(3), 3–32. https://doi.org/10.1257/jep.30.3.3

Yani, A. (2010). Kebijakan Distribusi Guru Melalui Participatory Management pada Era Otonomi Daerah. Jurnal Penelitian Pendidikan, 11(1), 1–12. https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/3476

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1956